

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggariskan ”Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengembalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Pendukung utama bagi tercapainya sasaran pembangunan manusia Indonesia yang bermutu adalah pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang bermutu dalam penyelenggaraannya tidak cukup hanya dilakukan melalui transmisi ilmu pengetahuan, teknologi, tetapi harus didukung oleh peningkatan profesionalisasi dan sistem manajemen tenaga kependidikan serta pengembangan kemampuan peserta didik untuk menolong diri sendiri dalam memilih dan mengambil keputusan demi tercapai cita-citanya.

Demikian juga pada Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bab III penegasan prinsip profesionalitas. Jelas kita dituntut memilih profesional di bidangnya masing-masing. Sesuai perkembangan sosial, ekonomi, pengetahuan dan teknologi yang terjadi saat ini sangat berpengaruh kepada

tuntutan akan pengelolaan sekolah. Oleh sebab itu sekolah harus dikelola oleh Sumber Daya Manusia yang mempunyai kinerja profesional. Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi yang didalamnya memuat struktur kurikulum, telah mempertajam perlunya disusun dan dilaksanakannya program pengembangan diri yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga pendidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi, kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karir peserta didik.

Bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok, agar mandiri dan berkembang secara optimal, dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar dan karir, melalui berbagai jenis pelayanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Pelayanan konseling merupakan upaya proaktif dan sistemik dalam memfasilitasi individu mencapai perkembangan yang optimal, pengembangan perilaku efektif, pengembangan lingkungan perkembangan, dan peningkatan keberfungsian individu dalam lingkungannya. Semua perilaku tersebut merupakan proses perkembangan yakni proses interaksi antara individu dengan lingkungan.

Pengampu bimbingan dan konseling adalah guru bimbingan dan konseling atau konselor yang merupakan salah satu kualifikasi pendidik.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006 dirumuskan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang harus dicapai peserta didik melalui proses pembelajaran bidang studi, maka kompetensi peserta didik yang harus dikembangkan melalui pelayanan bimbingan dan konseling adalah kompetensi kemandirian untuk mewujudkan diri (*self actualization*) dan pengembangan kapasitasnya (*capacity development*) yang dapat mendukung pencapaian kompetensi lulusan. Sebaliknya, kesuksesan peserta didik dalam mencapai SKL akan secara signifikan menunjang terwujudnya pengembangan kemandirian.

Agar pelaksanaan amanah dari pemerintah pusat melalui Badan Nasional Standar Pendidikan (BSNP) berupa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, sudah selayaknya kita mendapatkan, memahami yang akhirnya melaksanakan dengan lancar, optimal dan hasilnya maksimal.

Khusus pada struktur kurikulum baik jenjang pendidikan dasar dan menengah terdapat komponen "Pengembangan Diri" sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 23 tahun 2006 dan juga ditegaskan oleh BNSP, konselor maupun guru Bimbingan dan Konseling (BK) punya peran yang tidak boleh dianggap ringan. Karena kegiatan pengembangan diri berkaitan dengan potensi-potensi secara psikologis.

Di lapangan ternyata guru BK memang belum merasa ringan, dikarenakan permasalahan bimbingan dan konseling itu sendiri memang tidak sedikit.

Pelaksanaan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh guru BK sampai saat ini belum optimal, belum dapat kepercayaan ataupun belum diakui oleh selain guru BK. Dianggap tidak jelas, walaupun sudah ada Bimbingan dan Konseling Pola Tujuh Belas (17), bahkan disempurnakan lagi menjadi Pola 17 Plus. Hal ini terbukti guru BK masih diberi tugas selain tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari bimbingan dan konseling. Ada yang mengajar mata pelajaran, petugas usaha kesehatan sekolah (UKS), perpustakaan, bendahara dan lain sebagainya. Memang karena juga personil yang mau kerja, baik, ikhlas, menerima, jujur, sabar dan budi luhur. Namun aneh lagi posisi guru bimbingan dan konseling diisi oleh non profesi akademis guru BK. Sebagai contoh: mantan kepala sekolah non akademis, personal yang sudah sibuk (wakil, kepala sekolah), sisa-sisa guru mata pelajaran yang lebih distatuskan sebagai petugas BK

Guru BK sendiri bingung, apa lagi guru mata pelajaran, termasuk kepala sekolah dan stafnya, bahkan dinas pendidikan kabupaten juga tidak semua "nyambung". Hal ini menurut hasil observasi, wawancara dengan rekan-rekan pada kegiatan-kegiatan bimbingan dan konseling melalui Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK), studi banding dan kunjungan-kunjungan ke sekolah lain. Sehingga para siswapun belum bisa menikmati dari pelayanan konseling yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling di sekolah masing-masing.

Sebagai gambaran, berikut penulis sajikan tabel data guru bimbingan dan konseling yang menyusun program dan melaksanakan program kegiatan bimbingan dan konseling yang dihimpun oleh organisasi profesi Musyawarah

Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) SMP/MTs Kabupaten Lampung Selatan tahun 2008, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Guru BK yang Membuat Program dan Melaksanakan Pelayanan Konseling

NO	MEMBUAT PROGRAM PELAYANAN KONSELING	MELAKSANAKAN PELAYANAN KONSELING	JUMLAH		PREDIKAT
			GURU BK	%	
1	Ya	Ya	7	14	B a i k
2	Tidak	Ya	11	22	Kurang baik
3	Ya	Tidak	19	38	Tidak baik
4	Tidak	Tidak	13	26	Sangat tidak baik
*	JUMLAH	=	50	100	-

Sumber : MGBK SMP/MTs Lampung Selatan (2008)

Dari data di atas menunjukkan pelaksanaan pelayanan konseling belum sesuai dengan tugas pokok guru untuk menyusun program pelaksanaan, melaksanakan program, mengevaluasi program pelaksanaan, analisis hasil evaluasi program dan tindak lanjut pelaksanaan.

Selanjutnya tahun pelajaran 2009/2010, penulis mengumpulkan data menggunakan angket pelayanan konseling melalui kegiatan format klasikal untuk guru bimbingan dan konseling untuk mengetahui tingkat kebutuhan perangkat konseling klasikal. Hasil rekapitulasi analisis awal kebutuhan dari populasi guru bimbingan dan konseling SMP dan MTs se Lampung Selatan dengan

menggunakan sampel guru BK yang aktif di kegiatan Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) sejumlah 42 responden orang guru BK adalah sebagai berikut: 35 responden perlu atau membutuhkan, 5 responden tidak atau belum mengerti karena guru baru dan mutasi dari guru mata pelajaran dan 2 responden tidak menjawab pada pertanyaan akan kebutuhan perangkat pelayanan konseling format kegiatan klasikal. Untuk lebih jelas analisa kebutuhan akan perangkat pelayanan konseling klasikal oleh sampel guru bimbingan dan konseling yang aktif di MGBK SMP/MTs Lampung Selatan, membutuhkan perangkat pelayanan konseling format kegiatan klasikal sebesar delapan puluh tiga koma tiga persen.

Tabel 1.2 Data Analisis Kebutuhan Perangkat BK

NO	KEBUTUHAN TERHADAP PERANGKAT BK KLASIKAL	JUMLAH GURU	PROSENTASI
1	Membutuhkan	35	83,33 %
2	Tidak membutuhkan	5	11,91 %
3	Absen / Tidak menjawab	2	4,76 %
*	JUMLAH	42	100 %

Berarti guru BK membutuhkan perangkat pelayanan konseling format klasikal. Sehingga diharapkan perangkat tersebut dapat membantu dalam pelaksanaan pelayanan konseling klasikal. Namun sampai saat ini belum ada khususnya di kabupaten Lampung Selatan dan pada umumnya di Provinsi Lampung.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Guru BK masih banyak yang belum membuat program maupun perangkat dan kesulitan melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai kebutuhan.
2. Guru BK membutuhkan perangkat pelayanan konseling format kegiatan klasikal.
3. Guru BK belum memiliki kesempatan jadwal waktu dan materi yang teratur untuk pelayanan konseling klasikal.
4. Belum ada perangkat pelayanan konseling format kegiatan klasikal agar guru bimbingan dan konseling dapat melaksanakan layanan melalui klasikal.
5. Belum diketahui tingkat kesetujuan penggunaan perangkat pelayanan konseling format kegiatan klasikal oleh guru bimbingan dan konseling.
6. Masih ada kegiatan bimbingan dan konseling keluar dari fungsinya.
7. Bimbingan dan konseling belum mendapat kepercayaan sepenuhnya.
8. Belum diketahui tingkat kemudahan bagi guru BK dalam menggunakan perangkat pelayanan konseling format kegiatan klasikal.

1.3. Batasan Masalah

Agar dalam penelitian ini fokus dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang ada, maka dipandang perlu untuk membatasi masalah yang diteliti maupun

yang akan dikembangkan. Pembatasan permasalahan yang akan diteliti dan dikembangkan tersebut adalah:

1. Belum ada perangkat pelayanan konseling format kegiatan klasikal agar guru BK dapat melaksanakan layanan melalui klasikal.
2. Belum diketahui tingkat kesetujuan dan kemudahan oleh guru BK dalam penggunaan perangkat pelayanan konseling format kegiatan klasikal.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka masalah dalam penelitian dan pengembangan ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mengembangkan perangkat pelayanan konseling format kegiatan klasikal sesuai kebutuhan guru BK agar dapat melaksanakan layanan melalui klasikal ?
2. Bagaimana tingkat kesetujuan dan kemudahan oleh guru BK dalam penggunaan perangkat pelayanan konseling format kegiatan klasikal.

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Mengembangkan perangkat pelayanan konseling format kegiatan klasikal yang baik dan layak sesuai kebutuhan guru bimbingan dan konseling agar dapat melaksanakan layanan melalui klasikal.

2. Mengetahui tingkat kestujuan kemudahan bagi guru BK dalam menggunakan perangkat pelayanan konseling format klasikal.

1.6. Manfaat Penelitian

Berikut penulis harapkan akan kegunaan penelitian ini dalam arti merupakan manfaat yang dapat dipetik dari pemecahan masalah yang didapat dari hasil penelitian, yaitu :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk mencapai kawasan teknologi pendidikan yaitu desain dan pengembangan.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat

- Untuk guru bimbingan dan konseling, agar terpenuhi kebutuhan akan perangkat pelayanan konseling berupa format kegiatan klasikal
- Untuk bahan rujukan kepada kepala sekolah agar guru bimbingan dan konseling dapat melaksanakan layanan bimbingan dan konseling sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- Agar peserta didik dapat menikmati dari kegiatan bimbingan dan konseling format kegiatan klasikal.
- Untuk menambah kelengkapan administrasi pendidikan di bidang pelayanan konseling.